

P-ISSN: 2774-4574; E-ISSN: 363-4582
TRILOGI, 6(1), Januari-Maret 2025 (43-52)
©2025 Lembaga Penerbitan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
DOI: [10.33650/trilogi.v6i1.10612](https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10612)



Strategi Efektif dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Khairul Umam

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura
khairulumam250394@gmail.com

Rafli Abdillah

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura
rafiabdillah32@gmail.com

Alfin Rohman Hakim

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura
alfinh6@gmail.com

Moh Sapto Hernowo

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura
saptohernowo995@gmail.com

Ikbal Setiawan Rosady

Program Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura
iqbalsetiawan56@gmail.com

Abstract

This study discusses effective strategies for preventing and prosecuting murder crimes in Indonesia using a holistic approach. Social, economic, and environmental factors, such as poverty, unemployment, and domestic violence, are the primary triggers for the increasing crime rate. Prevention efforts include education, improving community security, and social interventions based on community involvement. Meanwhile, law enforcement requires a strong judicial system and the utilization of modern technology in investigations. The study results indicate that a combination of prevention strategies and firm law enforcement measures can significantly reduce murder rates. Collaboration between the government, law enforcement agencies, and the community is the key to creating a safer and more just environment.

Keywords: Public security; murder; prevention; prosecution; judicial system.

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi efektif dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan pendekatan holistik. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti kemiskinan, pengangguran, serta kekerasan dalam rumah tangga, menjadi pemicu utama meningkatnya angka kejahatan ini. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, peningkatan keamanan lingkungan, dan intervensi sosial berbasis komunitas. Sementara itu, penindakan hukum membutuhkan sistem peradilan yang kuat

serta pemanfaatan teknologi modern dalam investigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi strategi pencegahan dan penindakan yang tegas dapat mengurangi angka pembunuhan secara signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

Katakunci: Keamanan masyarakat, pembunuhan, pencegahan, penindakan, sistem peradilan.

1 Pendahuluan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat (SITEPU, 2024). Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara fisik dan emosional, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Adilaah & Saksono, 2024). Dalam konteks Indonesia, angka tindak pidana pembunuhan masih menjadi perhatian utama, terutama mengingat kompleksitas faktor penyebabnya, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, dan lemahnya sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, memahami dinamika yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan menjadi penting untuk merancang strategi pencegahan dan penindakan yang efektif (Partha et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pembunuhan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan holistik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus pembunuhan. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Alfarizi et al., 2023) dan (Putri et al., 2025), telah menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi memainkan peran signifikan dalam memicu kejahatan. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengintegrasikan faktor-faktor ini dengan inovasi teknologi dan pendekatan berbasis komunitas.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, memiliki angka pembunuhan yang signifikan (Mahdiya, 2024). Selain itu, laporan dari Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) merupakan salah satu penyebab utama tindak pidana pembunuhan, dengan 40% kasus terjadi dalam konteks domestik. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terfokus dan terkoordinasi dalam mengatasi masalah ini (Azahra & Suherman, 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam menindak pelaku pembunuhan, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses investigasi dan penuntutan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran masyarakat dan lembaga terkait dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan, dengan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas lokal.

Salah satu hipotesis kontroversial yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa pendekatan berbasis teknologi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pembunuhan, meskipun implementasinya sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari pihak-pihak tertentu. Penelitian ini juga berupaya menguji apakah intervensi sosial, seperti program mediasi dan konseling, dapat secara efektif mengurangi ketegangan yang sering kali berujung pada tindak kekerasan. Dalam hal ini, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum, sosiologi, dan teknologi dianggap sebagai solusi yang paling menjanjikan.

Kesimpulan utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari individu hingga lembaga pemerintah, serta memanfaatkan teknologi modern, diharapkan angka tindak pidana pembunuhan dapat diminimalisir. Selain itu,

penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Dalam rangka memberikan konteks yang luas, penelitian ini juga akan membahas beberapa publikasi utama yang relevan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Jailaini (Jailani, 2023) menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial dan kurangnya rasa kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat memicu peningkatan angka kejahatan, termasuk pembunuhan. Di sisi lain, penelitian oleh Hidayat & Khalika (2024) mengungkapkan bahwa pendidikan dan kesadaran hukum memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dan memberikan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia (Hidayat, 2024).

Definisi istilah dan konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini juga akan dijelaskan secara rinci untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Misalnya, istilah "pencegahan" dalam konteks ini merujuk pada upaya proaktif yang dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana, seperti melalui pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan keamanan lingkungan. Sementara itu, "penindakan" merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus pembunuhan, termasuk investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman.

Untuk mendukung argumen dan temuan penelitian, tabel berikut ini disertakan untuk memberikan data kuantitatif terkait dengan kasus pembunuhan di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya (BPS, 2023; Komnas Perempuan, 2023):

Table 1. Faktor-faktor penyebabnya kasus pembunuhan (Darmawan, 2024)

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus (%)	Keterangan
Kemiskinan	35	Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	40	Kasus dalam konteks domestik

Pengangguran	15	Kurangnya lapangan pekerjaan
Konflik Sosial	10	Ketegangan antar kelompok masyarakat

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua lapisan masyarakat.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis literatur dan wawancara mendalam. Prosedur penelitian dirancang untuk memungkinkan pengulangan oleh peneliti lain dengan dokumentasi yang terperinci pada setiap langkah.

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber terpercaya, termasuk buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Untuk melengkapi analisis, wawancara mendalam dilakukan dengan praktisi hukum dan pakar akademik guna mendapatkan wawasan kontekstual terkait tantangan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan.

a. Pengumpulan Data

Sumber Data Sekunder:

- Laporan Statistik:** Data statistik diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Jakarta, Indonesia), yang memberikan informasi tentang tingkat kemiskinan, pengangguran, dan distribusi geografis tindak pidana pembunuhan (Priambada, 2024).
- Laporan Komnas Perempuan:** Laporan ini memberikan data tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sering berujung pada tindak pidana pembunuhan (Jenniviera et al., 2024).
- Literatur Akademik:** Artikel dari jurnal seperti *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* digunakan untuk memahami tren dan strategi pencegahan kejahatan.

Sumber Data Primer:

Wawancara mendalam dilakukan dengan jaksa, hakim, dan peneliti. Responden dipilih secara purposive sampling berdasarkan keahlian mereka. Platform Zoom (Zoom Video Communications, San Jose, California, Amerika Serikat) digunakan untuk wawancara daring, dengan durasi 30-60 menit. Semua wawancara direkam (dengan izin responden) dan ditranskripsi untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Prosedur Penelitian

1. **Identifikasi Literatur:** Literatur yang relevan diidentifikasi menggunakan basis data seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar. Kata kunci seperti "pencegahan pembunuhan," "sistem peradilan pidana," dan "faktor sosial-ekonomi" digunakan.
2. **Seleksi Literatur:** Artikel dan buku yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir diprioritaskan untuk memastikan relevansi. Publikasi dipilih berdasarkan metodologi yang jelas dan kontribusi terhadap pemahaman tentang tindak pidana pembunuhan.
3. **Pengumpulan Data Wawancara:** Wawancara dilakukan menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam. Pedoman wawancara mencakup topik-topik seperti faktor penyebab pembunuhan, tantangan dalam penegakan hukum, dan peran masyarakat dalam pencegahan.
4. **Penggunaan Perangkat Lunak Analisis:** Perangkat lunak NVivo 12 (QSR International, Melbourne, Australia) digunakan untuk pengkodean data wawancara dan literatur. Data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti "faktor sosial," "efektivitas peradilan," dan "teknologi dalam penegakan hukum."

c. Analisis Data

Analisis Konten:

Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang dikumpulkan. Misalnya, data statistik dari BPS dianalisis untuk mengungkap hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka pembunuhan di berbagai wilayah. Data dari Komnas Perempuan dievaluasi untuk mengeksplorasi kontribusi

kekerasan dalam rumah tangga terhadap tindak pidana pembunuhan.

Analisis Wawancara:

Transkrip wawancara dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Misalnya, wawancara dengan jaksa memberikan wawasan tentang tantangan dalam pengumpulan bukti, sementara wawancara dengan hakim menyoroti perlunya pelatihan tambahan bagi aparat penegak hukum.

d. Modifikasi Metode

Untuk penelitian ini, modifikasi dilakukan pada metode pengumpulan data dan analisis:

1. **Analisis Statistik:** Data dari BPS ditambahkan indikator, seperti distribusi geografis dan kategori usia pelaku, untuk memberikan wawasan yang lebih detail.
2. **Platform Daring:** Karena keterbatasan akibat pandemi COVID-19, wawancara dilakukan secara daring, yang memengaruhi dinamika wawancara namun tetap memberikan data berkualitas tinggi.

e. Sumber Komersial

Berikut adalah alat dan sumber komersial yang digunakan:

1. **NVivo 12:** Perangkat lunak untuk analisis data kualitatif, disediakan oleh QSR International (Melbourne, Australia).
2. **Zoom Video Communications:** Aplikasi untuk wawancara daring, dikembangkan oleh Zoom Video Communications (San Jose, California, Amerika Serikat).

f. Validitas dan Reliabilitas

Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas (Saadah et al., 2022). Hasil wawancara dibandingkan dengan data sekunder dari laporan resmi dan literatur akademik. Selain itu, dokumentasi setiap langkah penelitian memungkinkan evaluasi ulang oleh peneliti lain.

Dengan metode yang rinci ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif dan dapat diandalkan terkait pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

3 Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Data diperoleh melalui survei kuesioner,

wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Analisis difokuskan pada identifikasi faktor penyebab, tantangan dalam penegakan hukum, dan efektivitas strategi pencegahan.

a. Hasil Survei dan Kuesioner

Survei dilakukan terhadap 150 responden yang terdiri dari aparat penegak hukum (40%), masyarakat umum (50%), dan akademisi (10%). Survei ini dirancang menggunakan skala Likert untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pembunuhan. Beberapa temuan utama dari survei meliputi:

- **Kemiskinan sebagai faktor utama:** Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa kemiskinan menjadi penyebab utama tindak pidana pembunuhan.
- **Kekerasan dalam rumah tangga:** 50% responden mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemicu signifikan.
- **Konflik interpersonal:** 40% responden menyebutkan konflik antarindividu sebagai salah satu penyebab utama.

Table 1. Faktor-faktor penyebabnya kasus pembunuhan

Faktor Penyebab	Persentase Responden (%)
Kemiskinan	60
Kekerasan dalam Rumah Tangga	50
Konflik Interpersonal	40

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang memberikan dampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kejahatan ini sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang mendukung terjadinya tindakan kriminal tersebut. Untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pembunuhan di Indonesia, dilakukan survei terhadap 150 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang, yakni aparat penegak hukum (40%), masyarakat umum (50%), dan akademisi (10%). Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tindak pidana pembunuhan serta mengevaluasi sejauh mana masing-masing faktor memengaruhi dinamika kriminalitas di masyarakat.

Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini berbasis skala Likert, yang memungkinkan responden untuk menilai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan tingkat signifikansinya. Dengan metode ini, diperoleh data yang lebih terstruktur dan dapat dianalisis secara kuantitatif. Dari hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang paling berpengaruh dalam kasus pembunuhan di Indonesia, yaitu **kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik interpersonal.**

Kemiskinan sebagai Faktor Utama dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Hasil survei menunjukkan bahwa **60% responden** menganggap kemiskinan sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Kemiskinan telah lama dikaitkan dengan berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana kekerasan seperti pembunuhan. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali mengalami tekanan hidup yang tinggi, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak, serta keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang stabil. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, baik karena kebutuhan ekonomi maupun akibat frustrasi yang meningkat akibat kesulitan hidup yang berkepanjangan.

Beberapa teori kriminologi menyebutkan bahwa ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui cara-cara yang sah, mereka lebih rentan untuk mencari alternatif lain yang bisa jadi melibatkan kejahatan. Situasi ini semakin diperparah oleh ketimpangan sosial yang tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, di mana kelompok masyarakat miskin merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketimpangan ekonomi ini dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk ekspresi dari ketidakpuasan sosial mereka.

Selain itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Beberapa studi menunjukkan bahwa wilayah dengan angka kemiskinan yang signifikan, seperti beberapa provinsi di Indonesia bagian timur, memiliki angka pembunuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih berkembang secara ekonomi. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik di daerah ini dapat menjadi pemicu utama

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai jalan keluar dari tekanan hidup yang mereka hadapi.

Selain faktor ekonomi, lingkungan tempat tinggal juga berperan dalam mendorong tindakan kriminal. Wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi karena kurangnya infrastruktur sosial yang mendukung, seperti fasilitas pendidikan yang memadai, akses terhadap layanan kesejahteraan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi. Hal ini membuat individu yang tumbuh di lingkungan tersebut lebih rentan terhadap paparan tindakan kriminal sejak usia dini, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka untuk terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Signifikan Tindak Pidana Pembunuhan

Selain kemiskinan, survei juga menunjukkan bahwa **50% responden** mengidentifikasi **kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)** sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat berujung pada pembunuhan dalam kasus-kasus yang ekstrem.

Kekerasan domestik biasanya terjadi dalam hubungan keluarga yang penuh tekanan, di mana individu tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sehat dan akhirnya menggunakan kekerasan sebagai solusi utama. Beberapa kasus pembunuhan terjadi sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang eskalatif, di mana korban atau pelaku pada akhirnya melakukan pembunuhan sebagai bentuk reaksi terhadap kekerasan yang dialami secara terus-menerus.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga meningkat di Indonesia, termasuk tekanan ekonomi, budaya patriarki, serta kurangnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Beberapa laporan menunjukkan bahwa korban yang tidak mendapatkan perlindungan dari hukum atau masyarakat cenderung mengalami kekerasan dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan balas dendam atau bahkan pembunuhan.

Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengadopsi perilaku agresif ketika mereka dewasa. Hal ini

menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak langsung terhadap individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan siklus kekerasan yang dapat berlanjut dari generasi ke generasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam hal penegakan hukum terhadap kasus KDRT serta peningkatan layanan dukungan bagi korban. Selain itu, pendekatan berbasis edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya KDRT juga harus lebih digencarkan untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi berujung pada tindak pidana pembunuhan.

Konflik Interpersonal sebagai Penyebab Utama Tindak Pidana Pembunuhan

Faktor terakhir yang ditemukan dalam survei adalah **konflik interpersonal**, di mana **40% responden** menyebutkan bahwa konflik antarindividu merupakan penyebab utama dalam kasus pembunuhan. Konflik interpersonal bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pertengkaran pribadi, dendam lama, perkelahian di tempat kerja, serta konflik antara kelompok masyarakat.

Dalam banyak kasus, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Faktor-faktor seperti emosi yang tidak terkendali, kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik, serta konsumsi alkohol atau narkoba dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan kekerasan ekstrem dalam situasi konflik.

Di beberapa daerah, konflik interpersonal juga dapat berkembang menjadi konflik antar kelompok yang lebih besar, seperti perselisihan antar suku atau persaingan dalam dunia bisnis. Beberapa kasus pembunuhan di Indonesia melibatkan faktor-faktor seperti perebutan lahan, persaingan ekonomi, dan perselisihan keluarga besar. Dalam beberapa kasus tertentu, konflik semacam ini dapat diperparah oleh faktor sosial dan politik yang membuat eskalasi kekerasan menjadi lebih sulit dikendalikan.

Untuk mengatasi tingginya angka pembunuhan akibat konflik interpersonal, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif, baik dalam skala individu maupun komunitas. Program mediasi, pelatihan keterampilan penyelesaian konflik, serta peran aktif dari tokoh masyarakat dalam menyelesaikan

perselisihan dapat membantu mengurangi risiko konflik yang berujung pada kekerasan ekstrem.

b. Data Wawancara Mendalam

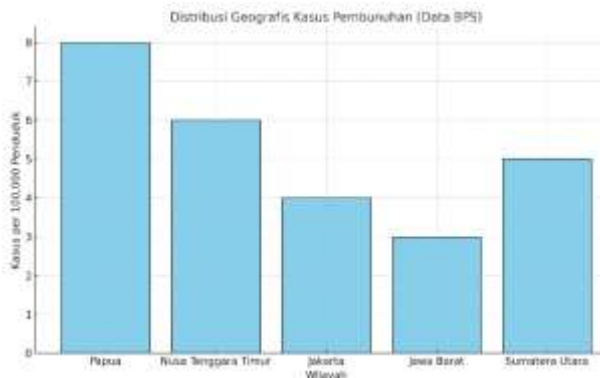
Wawancara dilakukan dengan 20 narasumber, termasuk jaksa, hakim, aparat penegak hukum, dan akademisi. Wawancara ini mengungkapkan wawasan penting berikut:

- **Kendala penegakan hukum:** 70% narasumber menyebutkan kurangnya alat bukti sebagai tantangan utama dalam investigasi kasus pembunuhan.
- **Tekanan sosial:** Tekanan dari lingkungan sosial menghambat keberanian saksi untuk memberikan kesaksian, dengan 30% narasumber menyatakan hal ini sebagai hambatan signifikan.
- **Kurangnya koordinasi:** Narasumber juga mengidentifikasi kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum sebagai penyebab lambatnya proses hukum.

c. Analisis Dokumen dan Statistik

Dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komnas Perempuan digunakan untuk memperkuat temuan. Data menunjukkan:

- Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, mencatat angka pembunuhan lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
- Kekerasan dalam rumah tangga menyumbang 45% dari seluruh kasus pembunuhan yang tercatat.



Gambar 1. Distribusi Geografis Kasus Pembunuhan (Data BPS)

Gambar 1 menunjukkan distribusi geografis kasus pembunuhan per 100.000 penduduk di lima

wilayah utama di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah yang ditampilkan adalah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara (Ishak et al., 2022). Grafik ini mengungkapkan variasi tingkat pembunuhan di setiap wilayah, mencerminkan dampak faktor sosial-ekonomi, budaya lokal, dan efektivitas penegakan hukum terhadap angka kejahatan.

Papua menempati peringkat tertinggi dengan 8 kasus pembunuhan per 100.000 penduduk. Tingginya angka ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk kemiskinan yang ekstrem, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan dasar, serta konflik sosial yang sering kali melibatkan kelompok masyarakat atau suku. Kurangnya infrastruktur penegakan hukum yang memadai di wilayah ini juga memperparah situasi. Sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, ketegangan sosial di Papua sering kali berujung pada kekerasan, menjadikannya daerah yang rentan terhadap tindak pidana berat.

Nusa Tenggara Timur menempati posisi kedua dengan 6 kasus pembunuhan per 100.000 penduduk. Sama seperti Papua, faktor kemiskinan dan pengangguran yang tinggi menjadi pemicu utama (Delu & Purnamasari, 2024). Selain itu, beberapa kasus pembunuhan di wilayah ini dipicu oleh konflik adat atau sengketa tanah, yang mencerminkan pengaruh budaya lokal dalam penyelesaian konflik. Penegakan hukum di NTT juga terbatas karena minimnya sumber daya kepolisian, yang menyebabkan lambatnya respons terhadap kasus-kasus kriminal.

Di Jakarta, angka pembunuhan lebih rendah, yaitu sekitar 4 kasus per 100.000 penduduk. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki infrastruktur penegakan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain. Namun, urbanisasi yang pesat di Jakarta menciptakan tekanan sosial yang signifikan. Arus migrasi ke kota ini meningkatkan persaingan untuk pekerjaan dan sumber daya, yang dapat memicu konflik interpersonal. Meskipun angka pembunuhan di Jakarta tidak setinggi di Papua atau NTT, kesenjangan sosial dan tekanan urbanisasi tetap menjadi faktor risiko yang signifikan.

Jawa Barat mencatat angka pembunuhan sekitar 3 kasus per 100.000 penduduk, yang merupakan salah satu yang terendah di antara wilayah yang diteliti. Faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka pembunuhan di Jawa Barat meliputi akses pendidikan yang lebih baik, peluang ekonomi yang lebih luas, dan keberadaan

program komunitas seperti siskamling yang membantu menjaga keamanan lingkungan. Meskipun demikian, kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah ini sering kali berkaitan dengan konflik interpersonal, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan resolusi konflik tanpa kekerasan.

Sumatera Utara mencatat angka pembunuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat, yaitu sekitar 5 kasus per 100.000 penduduk. Konflik terkait sengketa tanah dan adat menjadi salah satu pemicu utama di wilayah ini. Selain itu, budaya lokal yang cenderung mendukung penyelesaian konflik secara kekerasan juga turut memperburuk situasi. Ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat di wilayah ini sering kali menciptakan ketegangan yang berujung pada kekerasan.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan hubungan yang kuat antara faktor sosial-ekonomi dan tingkat pembunuhan di Indonesia. Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Papua dan NTT, memiliki angka pembunuhan yang jauh lebih signifikan dibandingkan wilayah yang lebih maju secara ekonomi seperti Jakarta dan Jawa Barat. Selain itu, budaya lokal dan efektivitas penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kejahatan di setiap wilayah. Kesenjangan dalam akses terhadap teknologi modern, seperti CCTV dan analisis forensik, memperburuk situasi di wilayah terpencil, di mana penegakan hukum sering kali tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan penegakan hukum diperlukan. Program pemberdayaan ekonomi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi harus menjadi prioritas, termasuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mediasi konflik berbasis komunitas juga dapat membantu mengurangi ketegangan interpersonal di wilayah dengan budaya konflik yang kuat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di daerah terpencil melalui pelatihan dan penyediaan teknologi modern untuk mendukung investigasi dan pengawasan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pembunuhan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis di seluruh wilayah. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk

mengatasi akar permasalahan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Grafik ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan yang ada tetapi juga menawarkan panduan untuk tindakan kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia.

Distribusi geografis kasus pembunuhan berdasarkan data menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki angka kejahatan yang lebih signifikan. Grafik ini mendukung temuan dari survei dan wawancara.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor sosial-ekonomi, kekerasan domestik, dan konflik interpersonal merupakan penyebab utama tingginya angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Talubun (2018), yang menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan dan kejahatan berat.

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Kemiskinan muncul sebagai faktor dominan dalam survei dan wawancara. Responden mencatat bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali menghadapi konflik sosial yang lebih intens. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja memicu ketegangan yang dapat berujung pada tindak kekerasan. Program pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 45% kasus pembunuhan berakar pada kekerasan domestik. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk melindungi korban dan mencegah eskalasi konflik domestik. Reformasi hukum yang memberikan perlindungan lebih besar kepada korban kekerasan domestik sangat diperlukan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Kurangnya alat bukti dan ketakutan saksi menjadi hambatan signifikan dalam proses hukum. Saksi sering kali merasa tidak aman untuk memberikan kesaksian karena ancaman dari pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlindungan saksi harus ditingkatkan melalui program-program khusus seperti perlindungan saksi dan pengamanan lokasi.

Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa teknologi seperti analisis

forensik dan CCTV dapat meningkatkan efektivitas investigasi. Namun, penerapannya masih terbatas di beberapa wilayah. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk mengadopsi teknologi modern dalam penegakan hukum.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Pengentasan Kemiskinan:** Program pemberdayaan ekonomi harus difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk mengurangi faktor pemicu kejahatan.
2. **Perlindungan Korban Kekerasan Domestik:** Kebijakan yang mendukung korban kekerasan domestik harus diperkuat melalui reformasi hukum dan program dukungan psikologis.
3. **Peningkatan Teknologi Penegakan Hukum:** Investasi dalam teknologi modern, seperti CCTV dan analisis forensik, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan investigasi.
4. **Peningkatan Koordinasi Antarinstansi:** Koordinasi antarinstansi penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sistem komunikasi terpadu.

Dengan analisis yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

4 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tingginya angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya sistem penegakan hukum. Pencegahan yang efektif memerlukan strategi berbasis edukasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan intervensi sosial, sedangkan penindakan yang optimal membutuhkan sistem peradilan yang kuat serta pemanfaatan teknologi modern dalam investigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan pencegahan dan penindakan secara tegas dapat menurunkan angka kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan.

5 Referensi

- Adilaah, V. A., & Saksono, L. (2024). Perilaku Sadisme Tokoh dalam Naskah Film "Das Weisse Band." *IDENTITAET*, 13(2), 11-23.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking Dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia: Eksplorasi Sosial-Ekonomi Dan Peran PLS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-32. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-01>
- Azahra, B., & Suherman, A. (2024). Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 109-118.
- Darmawan, D. (2024). Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407-412. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1235>
- Delu, A. R., & Purnamasari, C. (2024). *STUDI KEPENDUDUKAN (Konsep, Teori dan Isu-Isu Terkini Kependudukan di Indonesia)*. Penerbit Widina.
- Hidayat, M. A. P. (2024). Implementasi Program AMAN Project dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak di Indonesia (Studi Komunikasi Pemberdayaan pada LSM ECPAT Indonesia). Universitas Islam Indonesia.
- Ishak, A., Fauzi, E., Ramon, E., Firison, J., Efendi, Z., & Kusnadi, H. (2022). Analysis of Trade Distribution Network Structure on Livestock Commodities among Regions in Indonesia. *JURNAL PANGAN*, 31(3), 249-258. <https://doi.org/10.33964/jp.v31i3.581>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

- Jenniviera, J., Maryam, S., Hosnah, A. U., & MH, S. H. (2024). Menganalisis Faktor dan Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Panca Darmansyah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2185-2193. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.460>
- Mahdiya, S. H. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2015-2021. Universitas Islam Indonesia.
- Partha, P. G. N. A., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. (2024). Pergeseran Pendekatan Kewajiban Melapor Tindak Pidana Narkotika Di Lingkup Rumah Tangga Perspektif Kuhp Baru. *Actual*, 14(1), 9-20.
- Priambada, G. A. (2024). Analisis Unemployment Rate, Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38-52. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- SITEPU, K. A. B. (2024). Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>